

PENDAMPINGAN USAHA TEPUNG MOCAF UMKM DI KABUPATEN SUMEDANG

Heri Nugraha
Institut Manajemen Koperasi Indonesia
ziki007@yahoo.co.id

Abstrak

Tepung Mocaf saat ini merupakan produk unggulan dari Kabupaten Sumedang, untuk itu perlu dilakukan kegiatan pendampingan sebagai upaya pengembangan produk. Berkaitan dengan kepentingan Pendampingan Usaha maka dipilih dua (2) kelompok usaha yang sebelumnya merupakan binaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia yaitu kelompok Sarasa (pembuatan tepung mocaf) dan kelompok Mekar Harapan (pembuatan aneka produk olahan tepung mocaf di Kabupaten Sumedang).

Program Pendampingan Usaha yang dilakukan menggunakan pendekatan *capacity building* dan *technical assistance*, dengan fokus pada ; Peningkatan kapasitas kemampuan manajerial organisasi, Peningkatan kapasitas kemampuan teknik produksi dan teknik pengolahan limbah pasca produksi, Peningkatan pemasaran, Peningkatan modal usaha, Peningkatan jaringan bisnis, Sinkronisasi dengan program pemerintah atau SKPD terkait.

Perkembangan kinerja usaha dari kelompok Sarasa Kabupaten Sumedang yang mana pada saat sebelum dilakukan Pembinaan Pendampingan ekonomi Kinerja Usaha, Kelompok Sarasa hanya memiliki 71 poin dari 123 poin atau 57,72 % . PPE yang diberikan sebagai bentuk perlakuan dalam membantu meningkatkan kemajuan kelompok Sarasa mampu meningkatkan kinerja kelompok menjadi 107 poin dari 123 poin kinerja ideal atau sekitar 86,99 % . Peningkatan yang cukup signifikan yaitu 29,27 % terhadap kinerja usaha kelompok Sarasa.

Perkembangan kinerja usaha dari kelompok Mekar Harapan Kabupaten Sumedang, di mana sebelum dilakukan Pendampingan Usaha Kinerja Kelompok Mekar Harapan hanya memiliki 73 poin dari 127 poin atau 57,48 % . Pendampingan Usaha yang diberikan sebagai bentuk perlakuan dalam membantu meningkatkan kemajuan kelompok Mekar Harapan mampu meningkatkan kinerja kelompok menjadi 121 poin dari 127 poin kinerja ideal atau sekitar 95,28 % . Peningkatan yang cukup signifikan yaitu 37,80 % terhadap kinerja usaha kelompok Mekar Harapan.

Kata Kunci : *Pendampingan, Usaha, Kelompok*

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi tumbuh kembang yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan UMKM yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Sebagai salah satu komponen dalam industri nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan, dan

penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan situs depkop.go.id, dari tahun 2010 sampai tahun 2018 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Dengan data ini, dapat disimpulkan jika UMKM memiliki peran besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

Dibalik capaian-capaian yang telah diraih dan ditunjukkan oleh UMKM, teridentifikasi masih ditemukannya beragam persoalan yang tentunya perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Persoalan yang paling mendasar dalam

hal ini adalah terkait dengan masih rendahnya produktivitas UMKM. Rendahnya produktivitas ini disinyalir karena rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, dan rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM yang relatif masih masih jauh dibandingkan usaha besar. Selain rendahnya produktivitas, UMKM juga diperhadapkan pada terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 Tentang Pendampingan Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Kecil menjelaskan, untuk meningkatkan efektivitas pendampingan dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, perlu dilakukan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, peningkatan kualitas usaha Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; dan peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil.

Melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi Usaha Kecil dan Menengah ini, diharapkan dapat mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Tepung Mocaf saat ini merupakan produk unggulan dari Kabupaten Sumedang, untuk kepentingan Pendampingan Usaha maka dipilih dua (2) kelompok usaha yang sebelumnya merupakan binaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia yaitu kelompok Sarasa (pembuatan tepung mocaf) dan kelompok Mekar Harapan (pembuatan aneka produk olahan tepung mocaf di Kabupaten Sumedang).

Maksud kegiatan ini adalah memberikan Pembinaan Pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di lokasi sasaran kegiatan

pendampingan ekonomi. Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mampu bersinergi meningkatkan kegiatan ekonomi, sehingga dapat menunjang peningkatan kegiatan serta pertumbuhan ekonomi.

II. METODE

Pembinaan Pendampingan Usaha sebagai sebuah kegiatan pengembangan kelompok dampingan dari program Pendampingan Ekonomi harus menjadi angin segar baru bagi kelompok dalam meningkatkan kapasitas, keberdayaan dan kemandirian kelompok dalam menjalankan usahanya. Untuk itu selain penguatan secara internal kelompok, peranan pihak lain (*stakeholders terkait*) menjadi penting dalam membantu kelompok untuk lebih mandiri dan bisa menjaga keberlanjutan usaha masyarakat.

Kegiatan pembinaan pendampingan usaha ini dititik beratkan kepada;

1. Peningkatan kapasitas kemampuan manajerial organisasi.
2. Peningkatan kapasitas kemampuan teknik produksi dan teknik pengolahan limbah pasca produksi,
3. Peningkatan pemasaran,
4. Peningkatan modal usaha, dan
5. Peningkatan jaringan bisnis, serta
6. Sinkronisasi dengan program pemerintah atau SKPD terkait.

A. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap awal pengumpulan data dilakukan dengan cara survei instansional di instansi pemberi kerja guna mendapatkan data sekunder berupa kebijakan, hasil penelitian, gambar dan peta, buku-buku pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Data awal ini akan menjadi bekal untuk pengumpulan data di lapangan guna mendapatkan data primer.

Metode pengumpulan data primer dilakukan menggunakan teknik :

- a. *Observasi lapangan*
- b. *Wawancara*

Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Studi literatur*
- b. *Survei Instansional*

Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. *Analisis Kebijakan*
- b. *Analisis Daya Dukung*
- c. *Analisis Ekonomi Wilayah*
- d. *Analisis Kelembagaan*
- e. *Analisis SWOT*

B. Pelatihan Managerial Organisasi dan Kewirausahaan

a. Training Need Assessment (TNA)

Training Needs Assessment (TNA) atau analisis kebutuhan pelatihan adalah suatu langkah yang dilakukan sebelum melakukan pelatihan dan merupakan bagian terpadu dalam merancang pelatihan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang materi, alokasi waktu tiap materi, dan strategi pembelajaran yang sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan pelatihan agar pelatihan bermanfaat bagi peserta pelatihan. Dari analisis ini akan diketahui pelatihan apa saja yang relevan bagi suatu organisasi pada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Organisasi tidak dapat menentukan pelatihan begitu saja tanpa menganalisis dahulu kebutuhan dan tujuan apa yang ingin dicapai. Penilaian kebutuhan merupakan *road map* untuk mencapai tujuan organisasi.

b. Tahap Training Needs Assessment

1. Analisis organisasi

Analisis organisasi menentukan di mana pelatihan dapat dilakukan dan di mana seharusnya dilakukan. Analisis ini memfokuskan pada organisasi secara keseluruhan mencakup analisis tujuan organisasi, sumber daya, iklim organisasi, serta analisis lingkungan

eksternal dan internal organisasi. Analisis ini bertujuan memperoleh informasi tentang organisasi yang digunakan untuk menentukan tujuan pelatihan yang hendak dicapai. Sebagai tahap awal perlu adanya upaya mengkaitkan penilaian kebutuhan pelatihan dengan pencapaian tujuan organisasi sehingga kebutuhan pelatihan akan dapat diidentifikasi.

2. Analisis tugas

Analisis tugas mengidentifikasi pelatihan apa saja yang harus diberikan kepada anggota kelompok terkait dengan pekerjaannya. Tujuan analisis ini adalah mengetahui tentang tugas yang harus dilakukan anggota kelompok, penentuan standar kinerja untuk suatu pekerjaan, penentuan pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang diperlukan dalam suatu pekerjaan.

3. Analisis individu

Analisis individu mengidentifikasi siapa atau anggota kelompok mana yang membutuhkan pelatihan dan pelatihan apa saja yang perlu diberikan. Untuk itu perlu mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki tiap anggota kelompok yang meliputi:

- a. Penentuan metode pengukuran kemampuan
- b. Penyusunan instrumen pengukuran kemampuan
- c. Pengukuran kemampuan di lapangan
- d. Pengolahan hasil pengukuran kemampuan
- e. Gambaran hasil pengukuran kemampuan

Adapun beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Survei
- 2) Observasi
- 3) Wawancara individu
- 4) *Focus Groups Discussion*
- 5) *Performance Appraisal*

4. Penentuan kesenjangan kemampuan
Gambaran kemampuan anggota kelompok yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui adanya kesenjangan antara standar dengan kondisi aktual saat ini.
5. Rekomendasi
Setelah mengetahui bentuk kesenjangan yang ada dan faktor apa yang mempengaruhi, kemudian dapat ditentukan pelatihan apa yang perlu diberikan. Sehingga bisa merencanakan pelatihan dan pengembangan sebelum melaksanakannya.

c. Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan

Setelah melakukan analisis serta perencanaan, maka tahap selanjutnya dari pelatihan dan pengembangan adalah melaksanakannya. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. On The Job

On the job adalah metode pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja yang sebenarnya dan dilakukan sambil bekerja.

b. Off The Job

Off the job method adalah pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja terpisah/di luar tempat kerja dan di luar waktu regular:

Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan, Manajerial, Teknik Produksi dan Pengolahan Limbah Produksi

Desain model pendidikan kewirausahaan adalah melalui *Problem Based Learning* (PBL) yang merupakan salah satu strategi pelatihan yang berorientasi pada *contectual teaching and learning process* (Jones, Rasmussen dan Moffit, 1997). *Contectual Teaching and Learning* (CTL) merupakan konsep pelatihan yang membantu pelatih mengaitkan antara materi pelatihan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta pelatihan untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. PBL adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada pemecahan problem autentik yang terjadi sehari-hari (John, 2008:374).

PBL dapat diartikan sebagai pembelajaran berbasis proyek, pendidikan berbasis pengalaman, belajar *autentik* pembelajaran yang berakar pada masalah-masalah kehidupan nyata. Gijbels (2005:29) menyatakan bahwa PBL adalah cara pembelajaran yang bermuara pada proses pelatihan berdasarkan masalah-masalah nyata. Titik berat masalah-masalah nyata dalam proses pembelajaran ini merupakan hal yang paling penting.





Gambar 2.1. Foto Pelaksanaan Kegiatan

d. Pelatihan Pemasaran



Gambar 2.2. Pelatihan Pemasaran

Pemasaran merupakan faktor penting untuk mencapai sukses bagi perusahaan akan mengetahui adanya cara dan falsafah yang terlibat didalamnya. Cara

dan falsafah baru ini disebut konsep pemasaran (*marketing concept*).

e. Program Kerja

Kerangka Logis Pekerjaan

Tabel 2.1 Program Kerja Dan Tahapan Pelaksanaan Pendampingan Usaha UMKM di Kabupate Sumedang tahun 2019

No	Kegiatan Utama	Substansi	Jangka Waktu	Hasil Kerja	Target
1	Persiapan Pekerjaan	Mobilisasi personil Pengadaan Fasilitas Koordinasi Tim dengan Pemberi Tugas Penyusunan Metode, rencana, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan	4 Minggu	Laporan Pendahuluan	Minggu ke-1 s.d. ke-4
2	Pelaksanaan Pekerjaan				
A	Persiapan Pelaksanaan	Pengumpulan Data Sekuder Pengumpulan Data Primer Petemuan Dengan Tokoh Masyarakat dan Pemda Identifikasi Masyarakat dan Kelembagaan Analisis dan Kajian Data	4 Minggu	Terkumpul data sesuai kebutuhan pekerjaan Koordinasi dan Komunikasi dengan masyarakat dan Pemda Teridentifikasinya kebutuhan kelompok	Minggu ke-6 s.d. ke-9
B	Sosialisasi	Memberikan pemahaman tentang tujuan pembentukan kelompok Membangkitkan semangat usaha kembali.	1 Hari/ 4 lokasi	Tersebar nya informasi tentang tujuan program	Minggu ke-10
C	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus, Program, dan Organisasi	Bintek Peningkatan Kapasitas Kelompok Dan Anggota kelompok	1 Hari/ 4 lokasi	Peningkatan kapasitas kelompok	Minggu ke-12
D	Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi, Pemasaran, dan Pengolahan Limbah.	Bintek Peningkatan Kapasitas Kelompok Dan Anggota kelompok	1 Hari/ 4 lokasi	Peningkatan kapasitas kelompok	Minggu ke-12
E	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Ke akses permodalan, kemampuan akses ke produksi, dan kemampuan akses ke pemasaran.	Bintek Peningkatan Kapasitas Kelompok Dan Anggota kelompok	1 Hari/ 4 lokasi	Peningkatan kapasitas kelompok	Minggu ke-14
F	Rapat Koordinasi BPBD dengn SKPD untuk men-sinergikan dengan program kerja daerah	Mensinergikan dengan program kerja daerah	1 Hari/ 4 lokasi	Sinergi program usaha kelompok dengan program pemerintah Daerah.	Minggu ke-16
G	Temu Bisnis Dengan Pengusaha Lokal/Regional Di Tingkat Kabupaten	Membuka Akses Pasar Dan Permodalan	1 Hari/ 4 lokasi	Akses Pasar Dan Permodalan	Minggu ke-18
I	Seminar Nasional	Pembahasan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Pendampingan Ekonomi	1 Hari	Perbaikan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Pendampingan Ekonomi	Minggu ke-23
3	Penyelesaian/Penyerahan Laporan				
A	Laporan Pendahuluan	Metode, rencana, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan	3 Hari	Hard copy dan soft copyLaporan Pendahuluan	Minggu ke-4
B	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	Hasil pekerjaan di lapangan sebagai bahan laporan atau presentasi dengan mengundang instansi lintas sektoral	3 Hari	Hard copy dan soft copyLaporan PelaksanaanPekerjaan	Minggu ke-20
C	Draft Laporan Akhir	Hasil kegiatan pembinaan pendampingan ekonomi, dan hasil diskusi saran dan masukan.	3 Hari	Hard copy dan soft copy Draft Laporan Akhir	Minggu ke-23
D	Laporan Akhir	Perbaikan Draft Lapoaran Akhir	3 Hari	Hard copy dan soft copyLaporan Akhir	Minggu ke-24

Tabel 2.2 Agenda Seminar

No	Kegiatan	Materi	PIC
1	Pembukaan	Sambutan Pembukaan Seminar	BNPB
2	Pemaparan Prosedur Keselamatan	Penyampaian Prosedur Keselamatan Gedung	Management Gedung
3	Penjelasan Seminar Nasional	Penjelasan Maksud Dan Tujuan Dilaksanakannya Seminar	Team Leader Konsultan
4	Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pendampingan Ekonomi Di Wilayah Pascabencana	Pencapaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pendampingan Ekonomi Di Wilayah Pascabencana Hambatan Dan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan	Konsultan BPBD Perwakilan Kelompok Binaan
5	Perumusan Hasil Dan Rekomendasi	Perumusan Hasil Penyusunan Rekomendasi Kegiatan, Hambatan Dan Permasalahan	Konsultan
6	Penutupan	Penutupan Seminar	BNPB

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Bisnis Pendampingan Usaha UMKM Di Kabupaten Sumedang Tahun 2019

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skoring
A.	Standarisasi mutu	1. Kebijakan mutu	1.1. Perusahaan tidak memiliki kebijakan mutu	1
			1.2. Perusahaan memiliki kebijakan mutu, tapi tidak tertulis	2
			1.3. Perusahaan memiliki kebijakan mutu tertulis	3
		2. Sasaran mutu	2.1. Perusahaan tidak memiliki sasaran mutu	1
			2.2. Perusahaan memiliki sasaran mutu, tapi tidak tertulis	2
			2.3. Perusahaan memiliki sasaran mutu tertulis	3
		3. Audit mutu	3.1. Pimpinan tidak mengevaluasi apakah kebijakan mutu, sasaran mutu, telah mencapai sasaran	1
			3.2. Pimpinan pernah mengevaluasi apakah kebijakan mutu, sasaran mutu, telah mencapai sasaran	2
			3.3. Pimpinan pada akhir tahun selalu melakukan evaluasi	3
		4. Sertifikat halal	4.1. Perusahaan tidak memiliki sertifikat halal	1
			4.2. Perusahaan sedang dalam proses pengajuan sertifikat halal	2
			4.3. Perusahaan sudah memiliki sertifikat halal	3
5. Sertifikat SNI	5.1. Perusahaan tidak memiliki sertifikat SNI	1		
	5.2. Perusahaan sedang dalam proses pengajuan sertifikat SNI	2		
	5.3. Perusahaan sudah memiliki sertifikat SNI	3		
6. Piagam Bintang	6.1. Tidak pernah mengikuti pelatihan keamanan & kesehatan pangan	1		
	6.2. Pernah ikut pelatihan keamanan & kesehatan pangan	2		
	6.3. Menjalankan prinsip-prinsip sanitasi untuk keamanan & kesehatan pangan	3		
	6.4. Memperkenalkan prinsip-prinsip HACCP	4		
B.	Bahan baku dan penolong	1. Ketersediaan dan kesesuaian jumlah	1.1. Perusahaan sangat kesulitan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan	1
			1.2. Perusahaan kesulitan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan	2
			1.3. Perusahaan mudah mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan	3
		2. Ketersediaan dan kemudahan	2.1. Perusahaan tidak mudah melakukan pengadaan	1
			2.2. Perusahaan sedikit kesulitan melakukan pengadaan	2
			2.3. Perusahaan mudah melakukan pengadaan	3
		3. Ketersediaan dan ketepatan waktu	3.1. Bahan baku dan bahan penolong tidak tersedia pada saat dibutuhkan	1
			3.2. Bahan baku dan bahan penolong kadang-kadang tersedia pada saat dibutuhkan	2
			3.3. Bahan baku dan bahan penolong lebih sering tersedia pada saat dibutuhkan	3
			3.4. Bahan baku dan bahan penolong selalu tersedia pada saat dibutuhkan	4
		4. Kemampuan untuk menangani fluktuasi harga	4.1. Fluktuasi harga bahan baku dan bahan penolong menyebabkan proses produksi berhenti	1
			4.2. Fluktuasi harga bahan baku dan bahan penolong menyebabkan proses produksi sering berhenti	2

III. HASIL PEMBAHASAN

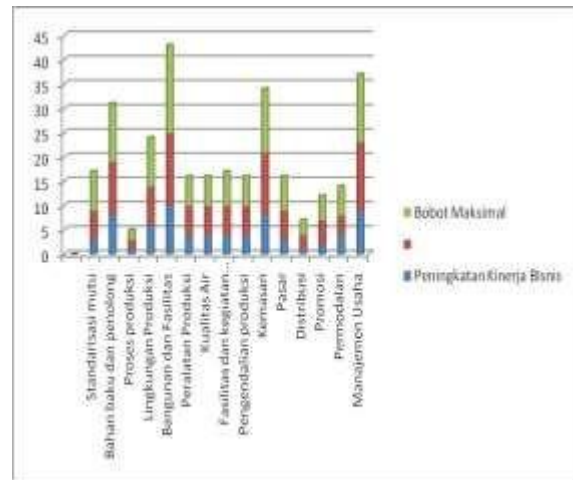
Kegiatan Pendampingan Usaha harus bisa memberikan dampak positif khususnya perkembangan kelompok binaan yang sedang

berjalan, untuk melihat dampak tersebut maka diadakan penilaian terhadap kondisi sebelum dan sesudah melalui Penilaian Kinerja Bisnis dan Pertumbuhan Bisnis dari usaha kelompok.

Kelompok Usaha Bersama SARASA Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.1. Peningkatan Kinerja Bisnis Kelompok SARASA

No	Variabel	Peningkatan Kinerja Bisnis		Bobot Maksimal
		Sebelum PPE	Setelah PPE	
1	Standarisasi mutu	3	6	8
2	Bahan baku dan penolong	8	11	12
3	Proses produksi	1	2	2
4	Lingkungan Produksi	6	8	10
5	Bangunan dan Fasilitas	10	15	18
6	Peralatan Produksi	4	6	6
7	Kualitas Air	4	6	6
8	Fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi	4	6	7
9	Pengendalian produksi	4	6	6
10	Kemasan	8	13	13
10	Pasar	3	6	7
11	Distribusi	1	3	3
12	Promosi	2	5	5
13	Permodalan	4	4	6
14	Manajemen Usaha	9	14	14
Total		71	107	123



Gambar 5.1. Diagram Peningkatan Kinerja Bisnis Kelompok SARASA

Data di atas menggambarkan perkembangan kinerja usaha dari kelompok Sarasa Kabupaten Sumedang, di mana sebelum dilakukan Pendampingan Usaha Kinerja Kelompok Sarasa hanya memiliki 71 poin dari 123 poin atau 57,72%.

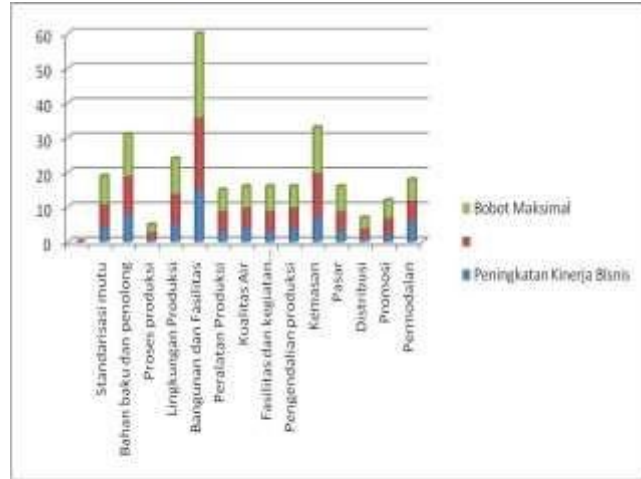
Pendampingan Usaha yang diberikan sebagai bentuk perlakuan dalam membantu meningkatkan kemajuan kelompok Sarasa mampu meningkatkan kinerja kelompok menjadi 107 poin dari 123 poin kinerja ideal atau sekitar 86,99%. Peningkatan yang cukup signifikan yaitu 29,27% terhadap kinerja usaha kelompok Sarasa.

Kelompok Usaha Bersama MEKAR HARAPAN

Gambar 5.2 Diagram Peningkatan Kinerja Bisnis Kelompok Mekar Harapan

Tabel 3.2. Peningkatan Kinerja Bisnis Kelompok MEKAR HARAPAN

No	Variabel	Peningkatan Kinerja Blsnis		Bobot Maksimal
		Sebelum PPE	Setelah PPE	
1	Standarisasi mutu	4	7	8
2	Bahan baku dan penolong	8	11	12
3	Proses produksi	1	2	2
4	Lingkungan Produksi	5	9	10
5	Bangunan dan Fasilitas	15	21	24
6	Peralatan Produksi	3	6	6
7	Kualitas Air	4	6	6
8	Fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi	3	6	7
9	Pengendalian produksi	4	6	6
10	Kemasan	7	13	13
11	Pasar	3	6	7
12	Distribusi	1	3	3
13	Promosi	2	5	5
14	Permodalan	6	6	6
15	Manajemen Usaha	7	14	14
Total		73	121	127



Gambar 5.2. Diagram Peningkatan Kinerja Bisnis Kelompok MEKAR HARAPAN

Data di atas menggambarkan perkembangan kinerja usaha dari kelompok Mekar Harapan Kabupaten Sumedang, di mana sebelum dilakukan Pendampingan Usaha Kinerja Kelompok Mekar Harapan hanya memiliki 73 poin dari 127 poin atau 57,48%.

Pendampingan Usaha yang diberikan sebagai bentuk perlakuan dalam membantu meningkatkan kemajuan kelompok Mekar Harapan mampu meningkatkan kinerja kelompok menjadi 121 poin dari 127 poin kinerja ideal atau sekitar 95,28 %. Peningkatan yang cukup signifikan yaitu 37,80 % terhadap kinerja usaha kelompok Mekar Harapan.

IV. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Simpulan

Perkembangan kinerja usaha dari kelompok Sarasa Kabupaten Sumedang, di mana sebelum dilakukan Pendampingan Usaha Kinerja

Kelompok Sarasa hanya memiliki 71 poin dari 123 poin atau 57,72% . Pendampingan Usaha yang diberikan sebagai bentuk perlakuan dalam membantu meningkatkan kemajuan kelompok Sarasa mampu meningkatkan kinerja kelompok menjadi 107 poin dari 123 poin kinerja ideal atau sekitar 86,99%. Peningkatan yang cukup signifikan yaitu 29,27% terhadap kinerja usaha kelompok Sarasa.

Perkembangan kinerja usaha dari kelompok Mekar Harapan Kabupaten Sumedang, di mana sebelum dilakukan Pendampingan Usaha Kinerja Kelompok Mekar Harapan hanya memiliki 73 poin dari 127 poin atau 57,48 % .

Pendampingan Usaha yang diberikan sebagai bentuk perlakuan dalam membantu meningkatkan kemajuan kelompok Mekar Harapan mampu meningkatkan kinerja kelompok menjadi 121 poin dari 127 poin kinerja ideal atau sekitar 95,28 % . Peningkatan

yang cukup signifikan yaitu 37,80 % terhadap kinerja usaha kelompok Mekar Harapan.

5.2. Rekomendasi

Keberlanjutan usaha kelompok terdampak harus terus dijaga dan didorong supaya bisa berkembang dan meningkat, untuk itu perlu terus dilakukan pembinaan terhadap kelompok. Pemerintah Daerah diharapkan melanjutkan program tersebut; untuk itu kiranya perlu semua pihak untuk memperhatikan beberapa rekomendasi berikut ini;

1. Pemerintah Daerah melalui SKPD Kabupaten terkait lainnya harus terus menjaga keberlangsungan perekonomian kelompok dengan mengacu kepada kesepakatan bersama atas dukungan keberlanjutan ekonomi kelompok dan dukungan terhadap implementasi dari *Masterplan* Kelompok.
2. Pemerintah Daerah melalui BPBD terus mengkoordinasikan OPD terkait lainnya yang siap dan berkomitmen terhadap keberlanjutan ekonomi kelompok agar terus membantu kelompok sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah melalui BPBD dan OPD terkait lainnya juga harus terus mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kelompok dengan dunia bisnis terkait lainnya, dan mendorong terus kerjasama yang sudah terbentuk dalam temu bisnis.
4. Pemerintah Daerah melalui BPBD dan OPD terkait lainnya harus terus mengawal dan menjaga semangat kelompok agar mereka dengan sadar diri mau merubah keadaan perekonomian yang terganggu melalui program ini.
5. Pemerintah Daerah melalui BPBD dan OPD terkait lainnya harus bisa mendorong kelompok agar menjaga baik program dan mengembangkannya demi kemajuan anggota kelompok.

6. Pemerintah Daerah melalui BPBD dan OPD terkait lainnya harus bisa mengkoordinasikan program kelompok dengan pemerintah tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam sinergisitas program demi meningkatkan kemajuan dan perkembangan kelompok.

REFERENSI

- Bell, Stephanie. 2010. Project Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. Taylor and Francis Group
- Barge, Scoot. 2010. Principles of Problem and Project Based Learning. Aalborg University
- Gijbels, D, Dochy, F dan Van de Bossche, F. 2005. Effects of The Problem Based Learning. A Meta-analysis from the Angle Measurement. Journal Review of Educational Research. Vol.75, 27-49.
- Jones, Beau Fly, Rasmussen, Claudette M., & Moffitt, Mary C. (1997) Real Life Problem Solving: A Collaborative Approach To Interdisciplinary Learning. Washington D.C.: American Psychological Association
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Jakarta
- Sangadji, E.M dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: C.V Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-Undang No.17 Tahun 2013. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 Tentang Pendampingan Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Kecil
- <http://www.depkip.go.id/data-umkm>